

Delegasi G20 Kunjungi Bogor, Nikmati Es Pala dan Toge Goreng

BOGOR (IM)- Puluhan delegasi Group of Twenty (G20) mendatang Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis (4/8) malam. Kota Bogor menjadi salah satu kota tujuan rangkaian G20 Technical Workshop on Climate Change.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyambut para delegasi dengan jamuan makan malam yang khas Bogor, seperti Es Pala dan Toge Goreng. Para delegasi dibenarkan toponim yang menjadi ciri khas seni Sunda. Para delegasi juga disajikan tari-tari tradisional khas Sunda seperti Tari Topeng dan Tari Jaipong. Mereka juga dipertontonkan video profil Kota Bogor yang berisikan kebudayaan dan berbagai ikonik Kota Bogor.

"Merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami, ketika pemerintah dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia memilih Kota Bogor sebagai tempat penyelenggaraan workshop ini," kata Dedie dikutip Jumat (5/8). Dedie mengungkapkan, secara de facto memang Kota Bogor menjadi Ibu Kota Indonesia. Diketahui Presiden Joko Widodo berkantor dan berkediaman di Istana Bogor. Untuk itu, Kota Bogor punya

kesempatan untuk ikut berperan di dalam upaya masyarakat dunia khususnya negara-negara yang tergabung di dalam G-20 untuk mencari dan merumuskan berbagai solusi.

Terutama atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada isu perubahan iklim serta pengaruh negatifnya. Khususnya tentang ancaman krisis pangan bagi seluruh umat manusia di bumi sesuai dengan tema workshop. "Kepada seluruh delegasi peserta Technical Workshop on Climate Change, kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga seluruh kegiatan yang telah diagendakan di dalam workshop ini dapat berjalan lancar dan sukses. Dan jangan lupa kembali lagi ke Kota Bogor dengan mengajak seluruh keluarga," ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan Delegasi G20 dari Argentina, Pablo Mercury mengaku senang bisa mengunjungi Kota Bogor. Meski hanya beberapa hari saja, dirinya dan para delegasi mengaku nyaman dengan suasana yang ada di Kota Bogor. "Begitu kami masuk ke sini (Balai Kota) juga sangat indah sekali. Apalagi kami tadi sempat mengunjungi Kebun Raya Bogor yang juga tak kalah indahnya," tutur Pablo. ● **yan**

Kereta Cepat Tes Dinamis November 2022

BANDUNG (IM)- Kementerian Perhubungan (Kemhub) menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat menjalani tes dinamis pada November 2022 mendatang. Ini bertepatan dengan penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

"Proyek ini merupakan wujud persahabatan Indonesia-Tiongkok yang selalu dibahas dalam pertemuan kedua negara. Untuk itu mari kita dukung proyek KCJB ini agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (5/8).

Menhub menjelaskan, KCJB mengadopsi teknologi tinggi yaitu Grade of Automation (GOA) Level 1, serta memiliki desain yang ramping sehingga dapat mendukung akselerasi atau kecepatan dari kereta tersebut yang bisa mencapai 350 km/jam. Nantinya, KCJB akan melayani sebanyak 68 perjalanan setiap harinya dan berhenti di lima stasiun. "Waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya membutuhkan waktu 36-45 menit. Sebelumnya membutuhkan kurang lebih 2,5 jam untuk sampai tujuan," ucap Menhub.

Kehadiran KCJB sebagai transportasi massal yang ramah lingkungan, dengan tingkat keselamatan dan keamanan

yang baik serta efisiensi waktu, diharapkan dapat semakin meningkatkan minat masyarakat untuk lebih memilih menggunakan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi.

"Untuk itu, saya membangun kecepatan waktu konstruksi dan integrasi sistem dapat dipercepat, agar manfaat yang sudah menunggu masyarakat pengguna kereta api dapat segera bisa dirasakan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, pengiriman perdana EMU dan Comprehensive Inspection Train (CIT) ini merupakan pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari China ke luar negeri.

Sebanyak 11 rangkaian kereta yang diproduksi oleh CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China ini telah selesai diproduksi pada awal April tahun ini. EMU dan CIT yang dikirimkan ke tanah air ini telah menyelesaikan static test dan dynamic test di tempat produksinya. "Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek KCIC telah mencapai 85 persen, dan masih menyisakan beberapa pekerjaan tunnel 2, per loading, track laying dan penyelesaian stasiun," ujarnya. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERESMIAN WISATA SITU RAWA KALONG

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) bersama Bonge (kiri) berjalan di atas floating brigade saat peresmian Situ Rawa Kalong di Curug, Depok, Jawa Barat, Jumat (5/8). Selesaiannya revitalisasi Situ Rawa Kalong yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti jogging track, tembok mural dan floating brigade bertujuan menjadikan situ sebagai tempat destinasi wisata.

Anggaran Samisade Kab. Bogor Rp395 M, Belum Semua Desa Ajukan Proposal

Masih ada 11 desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Samisade tahun 2021. Sehingga, ada kemungkinan 11 desa itu tidak akan mendapat Samisade, kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah.

CIBINONG (IM)- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, mengungkap 413 desa telah mengajukan proposal permohonan pencairan program bantuan keuangan desa atau Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang akan digulirkan pertengahan Agustus 2022 ini.

"Yang mengusulkan sudah 413 desa. Kita verifikasi dulu yang proposalnya sudah memenuhi syarat akan langsung dicairkan," kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah, Jumat (5/8). Renaldi mengungkapkan masih ada 11 desa belum

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Samisade tahun 2021. Sehingga, ada kemungkinan 11 desa itu tidak akan mendapat Samisade.

Pasalnya, Samisade 2022 akan diluncurkan pertengahan Agustus ini, meski masih menunggu hasil revisi Peraturan Bupati (Perbup) terkait penggunaan Samisade 2022 yang kini menunggu verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi masih ada 11 desa belum menyampaikan LPJ lewat verifikasi kecamatan. Mereka pun termasuk mengajukan untuk pencairan Samisade 2022. Nanti kita lihat. Kan LPJ juga menjadi syarat utama dalam pencairan," tegas

Renaldi.

Renaldi optimistis anggaran Samisade tahun 2022 sebesar Rp395 miliar dapat terserap maksimal di sisa tahun ini. "Insya Allah terkejar ya. Kita pertengahan Agustus ini launching kok," jelasnya.

Diketahui, Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor telah menyetujui anggaran Samisade sebesar Rp359 miliar dalam APBD 2022.

"Samisade sudah dianggarkan, kami sudah sahkan untuk masuk APBD 2022. Tapi kami minta agar regulasinya diperkuat. Seperti merevisi peraturan bupati (perbup) atau dinaikkan menjadi peraturan daerah (perda)," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, KH Agus Salim.

Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, meminta payung hukum yang tegas dalam penyaluran Samisade tahun 2022, demi keamanan pihak-pihak yang menggunakan, terutama para kepala desa, agar tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.

Selain itu, DPRD juga meminta Inspektoral memperkuat pengawasan Samisade, mulai dari pengajuan dari pemerintah desa, selama penggunaan hingga evaluasi setelah Samisade selesai diserap.

"Kami sangat mendukung karena untuk percepatan pembangunan di desa dan kepentingan masyarakat. Tapi payung hukumnya harus jelas, jangan sampai ada pihak yang dirugikan," tegasnya. ● **gio**

Kejari Cibinong Siap Jemput Paksa Tersangka S Jika Kembali Mangkir

BOGOR (IM)- Kejari Kabupaten Bogor di Cibinong meminta agar tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana alam atau BIT, S, agar kooperatif. Sebab jika tidak, pihaknya bakal melakukan jemput paksa terhadapnya. Kejari Cibinong sendiri akan memanggil kembali tersangka S untuk diperiksa pada Kamis (18/8),

dengan agenda pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam atau BIT Kabupaten Bogor anggaran tahun 2017.

Kepala seksi pidana khusus Dodi Wiratmaja meminta tersangka S bersikap kooperatif, atas panggilan kedua tersebut. "Di panggilan kedua pada Kamis (18/8), Kami minta tersangka S bersikap kooperatif karena kalau tidak, otomatis bakal dijemput paksa," tegas Dodi Wiratmaja kepada wartawan, Jumat (5/8).

Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak pekan lalu, maka, tambah Dodi Wiratmaja. Apabila tersangka melakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar, maka proses hukumnya terus berlanjut.

"Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor belum mengembalikan kerugian negara, walaupun nanti ada pengembalian, maka dipersilakan. Na-

mun proses hukumnya terus berlanjut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, dengan alasan sakit, tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) bantuan bencana alam atau bencana tidak terduga (BIT) Tahun 2017 yaitu S (53 tahun) mangkir dari panggilan aparat adhyaksa.

Sementara itu, tersangka SH selaku staf di Bidang Kedaruratan dan Logistik badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), akan memenuhi panggilan pada esok hari.

"Di surat panggilan pertama tersangka S dan SH tidak hadir, kalau S beralasan sakit yang disertai dengan surat dokter. Tersangka lainnya yaitu SH akan memenuhi panggilan pada esok hari," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Agustian Sunaryo kepada wartawan, Kamis, lalu.

Agustian Sunaryo menuturkan bahwa kedua tersangka bekerjasama dalam dugaan Tipikor, rekayasa atau manipulasi data dimulai proses verifikasi korban bencana alam.

"Tersangka SH bertugas memanipulasi data korban bencana alam, contoh rumah para korban bencana alam dimasukkan kategori rusak berat, padahal rusak sedang atau ringan. Hingga selisih nilai

bantuan dikantongi oleh para tersangka. Selain itu, ada juga korban bencana alam yang sama sekali tidak menerima uang BIT," tutur Agustian Sunaryo.

Ia menambahkan, bahwa para tersangka juga memanfaatkan surat keputusan (SK) Bupati Bogor saat itu, dalam menjalankan modus operandinya.

"Selain modus operandi di atas, ada juga bantuan bencana alam atau pencairan BIT yang tidak langsung diserahkan langsung ke korban bencana alam, tetapi disalurkan dan diserahkan ke pemerintah desa setempat. Tundanya, hal tersebut melanggar standar atau prosedur," tambahnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Dodi Wiratmaja menjelaskan akan menyerahkan audit pemberian bantuan bencana alam atau pencairan BIT di 11 kecamatan lainnya, yang juga diduga dikorupsi oleh para tersangka kepada Inspektoral Kabupaten Bogor.

"Inspektoral Kabupaten Bogor kami minta untuk mengaudit kerugian dan menagih ganti rugi kerugian negara, akibat dugaan Tipikor yang dilakukan oleh para tersangka di 11 kecamatan lainnya, di tahun anggaran yang sama," jelasnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

UNJUK RASA TENAGA KESEHATAN HONORER DI BANDUNG

Peserta aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8). Dalam aksinya, tenaga kesehatan honorer tersebut menuntut untuk non-ASN nakes dan non-nakes yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk segera diakomodir dan diangkat sebagai ASN maupun PPPK menyesuaikan PP nomor 49 tahun 2018.

Tujuh Bulan Beroperasi, BNN Kab. Bogor Amankan 11 Tersangka Pengedar Narkotika

CIBINONG (IM)- Selama tujuh bulan beroperasi, BNN Kabupaten Bogor berhasil mengungkap 10 kasus peredaran narkotika jenis ganja, sabu, dan ekstasi.

Dari 10 kasus tersebut, BNN Kabupaten Bogor mengamankan 11 orang yang diduga atau disangka sebagai pengedar narkotika. Beberapa di antaranya bahkan kini sedang menjalani persidangan.

Kepala BNN Kabupaten Bogor, AKBP Mohammad Sably Noer mengatakan, dari 11 orang tersangka itu barang bukti narkotika yang diamankan yakni 5 butir ekstasi, 8,5 kg ganja kering, 250 gram daun ganja, dan 27 gram shabu.

Tak hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, menurutnya pengungkapan

peredaran narkotika itu juga dilakukan di Kota Bogor.

"Selain modus tempel, peredaran narkotika di Kabupaten dan Kota Bogor juga ada yang melalui jasa kurir serta penggeledahan di lokasi TKP (tempat kejadian) yaitu tempat hiburan malam," kata Sably Noer kepada wartawan, Jumat (5/8).

Terhadap para tersangka pengedar narkotika, BNN Kabupaten Bogor mengenaikan pasal 114 (2) juncto pasal 111(2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan peredaran narkotika.

"Tersangka terkena ancaman hukuman pidana penjara minimal selama 5 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp10 miliar," jelasnya. ● **gio**

Ribuan Honorar Nakes Demo di Gedung Sate, Tuntut Diangkat ASN

BANDUNG (IM)- Ribuan honorar tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Kantor Gedung Sate, Bandung, Jumat (5/8). Mereka menuntut untuk diangkat menjadi aparat sipil negara (ASN).

"Ya harapan kami terkait dengan masalah PP nomor 49 tahun 2018 tentunya kami non-ASN nakes dan non-nakes yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di puskesmas maupun rumah sakit untuk diakomodir semuanya dan diangkat sebagai ASN," ujar Ketua Forum Komunikasi Honorar Fasyankes Jabar, Suhendri, Jumat (5/8).

Ia menuturkan pada 2023, honorar akan dihapuskan oleh karena itu pihaknya meminta agar seluruh nakes dan non-nakes diangkat menjadi ASN. Mereka yang terlibat dalam aksi berasal dari wilayah di

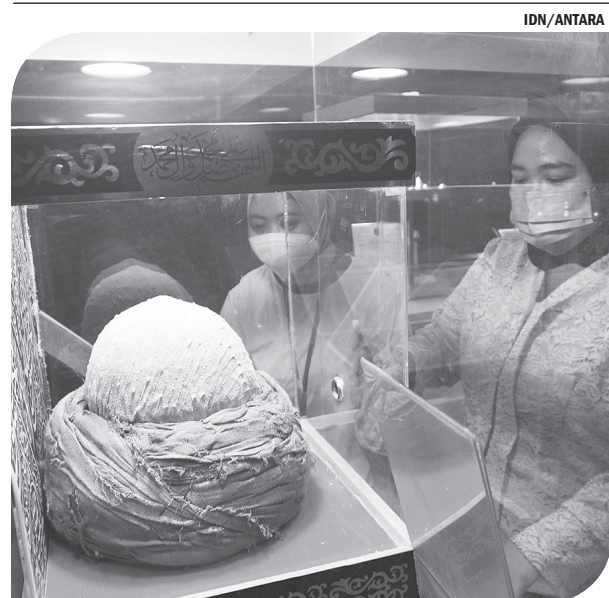
Jawa Barat. "Itu banyak ya, perwakilan kabupaten kota se-Jabar seperti ada Sukabumi, Karawang, Bekasi, Tasik, Cianjur, dan yang lainnya," katanya.

Ia mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi termasuk beraudiensi dengan pemangku kepentingan. Namun, sejauh ini belum menghasilkan apapun untuk kepentingan mereka.

"Ini seluruh Jabar itu jumlahnya keseluruhan dari estimasi kami itu sekitar puluhan ribu tenaga honorer dan yang datang ke sini itu ada sekitar 10 ribu," katanya.

Mereka akan beraudiensi dengan perwakilan provinsi Jawa Barat dan berharap terdapat solusi. Sebab, banyak tenaga honorer yang berstatus pegawai tidak tetap non-ASN bahkan pekerja harian lepas.

"Jadi sampai saat ini kami intinya masih mendapatkan upah atau honor di bawah layak. Insya Allah kami akan terus berjuang," katanya. ● **pur**



IDN/ANTARA

PAMERAN ARTEFAK PENINGGALAN NABI MUHAMMAD SAW

Pengunjung melihat barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW pada pameran artefak di Gedung Juang, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/8). Sebanyak 10 artefak seperti pedang, karpet, dan darah bekam dipamerkan dengan tujuan untuk meningkatkan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW.

Pemkot Bandung akan Buat Ruang Terbuka Hijau di Bawah Flyover Kopo

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menata ruang terbuka di bawah flyover Kopo. Kebijakan tersebut agar area tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang lain seperti tempat parkir menaruh bus-bus atau angkat dan pedagang kaki lima (PKL).

"Yang paling kita perhatikan adalah ruang yang ada di bawah (Flyover Kopo). Itu alhamdulillah bahwa kelihatannya tidak ada potensi untuk dimanfaatkan untuk jasa angkutan travel yang dijadikan garasi," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna usai meninjau flyover Kopo, Jumat (5/8).

Ia menuturkan beberapa bagian ruang terbuka pada ujung Flyover Kopo pun telah ditutup oleh dinding dan dicat dengan lambang Kementerian PUPR. Rencana ke depan ruang terbuka di bawah flyover Kopo akan ditanami pohon.

"Kita tadi dengan pak Kadishub itu ruang bisa dimanfaatkan untuk di bawah untuk ditanami pohon, sehingga nanti tidak ada ruang bagi siapa pun untuk beraktivitas tidak sesuai dengan semestinya, misalnya ada PKL dan lain sebagainya," katanya.

Ema ingin memastikan

bahwa ruang terbuka di bawah flyover Kopo aman dan terjaga secara estetika. Terkait waktu peresmian flyover Kopo sendiri ia mengaku belum mengetahui pasti.

Ia menambahkan pada jalur naik flyover dari arah timur perlu dilakukan perluasan area dengan pembebasan lahan. Sebab, dikhawatirkan bagi pengendara yang datang dari timur harus lebih berhati-hati lagi.

"Di jalan (dekat) Bank Mandiri itu perlu ada penambahan pembebasan lahan karena kalau orang akan masuk ke flyover atau di sampingnya itu masih jadi persoalan kalau menurut saya, agak kurang nyaman bagi pengunyahnya, itu harus hati-hati," katanya.

Selain itu pada jalur keluar flyover Kopo terdapat bangunan kecil di sebelah kiri yang harus diperbaiki. Sebab, dikhawatirkan dapat mengganggu pengendara.

"Termasuk juga ada sedikit bangunan kecil yang begitu turun dari flyover itu atau dari sebelah kiri nyambung ke turunan flyover itu menurut saya harus ada yang diperbaiki, supaya aspek keselamatan tetap diutamakan," katanya. ● **pur**